

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SUB BIDANG BINA
MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DALAM PEMELIHARAAN JALAN
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MEKY IRANDA
NPM : 147310439

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru”. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi. S.H., MCL bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Zaini Alli, M.Si selaku Dosen Pembimbing I (Satu) atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Terima kasih Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

7. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada alm. Ayahanda Yusri dan Ibunda Suwarni tercinta terima kasih atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti bagi penulis.
8. Terima kasih buat kakak saya kak Dessy Anjana, kak Opi serta adik saya Rully Ariasepta telah memberi dukungan buat penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
9. Kepada teman spesial saya Silmia terima kasih telah memberi dukungan buat penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. dan sukses di masa depan, Amiin Ya Robbal'alamiin

Akhir kata hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan kepada semua orang-orang yang tersayang. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis,

Meky Iranda

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan.....	16
3. Konsep Kebijakan.....	17
4. Konsep Evaluasi.....	19
5. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	23
6. Konsep Pemeliharaan.....	25
7. Konsep Pelaksanaan Tugas.....	26
8. Konsep Pelaksanaan Fungsi.....	26
9. Konsep Monitoring (Pengawasan).....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasional Variabel.....	34
F. Teknik Pengukuran.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Teknik Penarikan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41

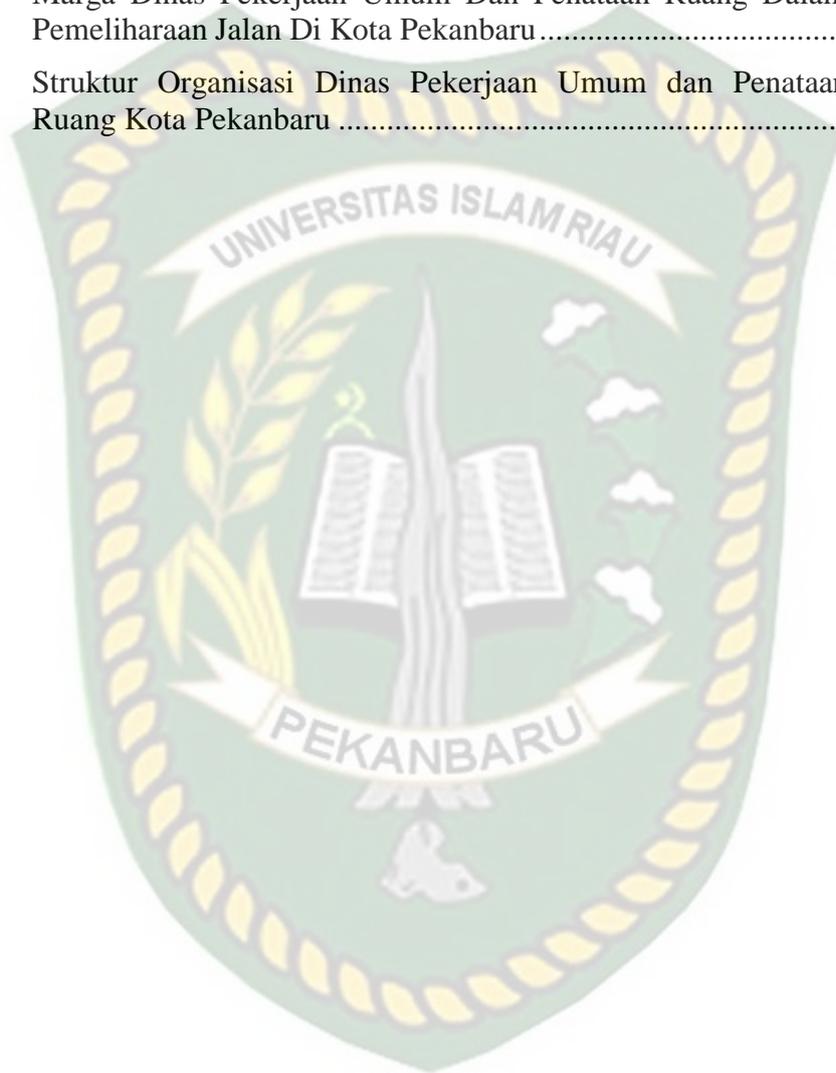
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	43
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	44
1. Sejarah Kota Pekanbaru	44
2. Wilayah Geografis	46
3. Pendidikan.....	47
4. Perekonomian.....	48
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	49
1. Struktur Organisasi.....	49
2. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga.....	52
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Identitas Responden	58
1. Usia Responden.....	58
2. Jenis Kelamin Responden Penelitian	59
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	60
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru	61
1. Efektivitas	62
2. Efisiensi.....	64
3. Kecukupan.....	66
4. Perataan.....	68
5. Responsivitas.....	70
6. Ketepatan.....	72
C. Hambatan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru	76
BAB VI : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.I	Ruang Bagian-Bagian Jalan.....	9
I.2	Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru.....	10
II.1	Penelitian Terdahulu.....	29
II.2	Operasional Variabel Penelitian.....	34
III.1	Populasi dan Sampel pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.....	40
III.2	Perincian Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.....	43
V.1	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	58
V.2	Keadaan responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.3	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Efektivitas.....	62
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Efisiensi.....	65
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Kecukupan.....	67
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perataan.....	69
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Responsivitas.....	71
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Kecukupan.....	73
V.10	Rekapitulasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.....	75

DAFTAR GAMBAR

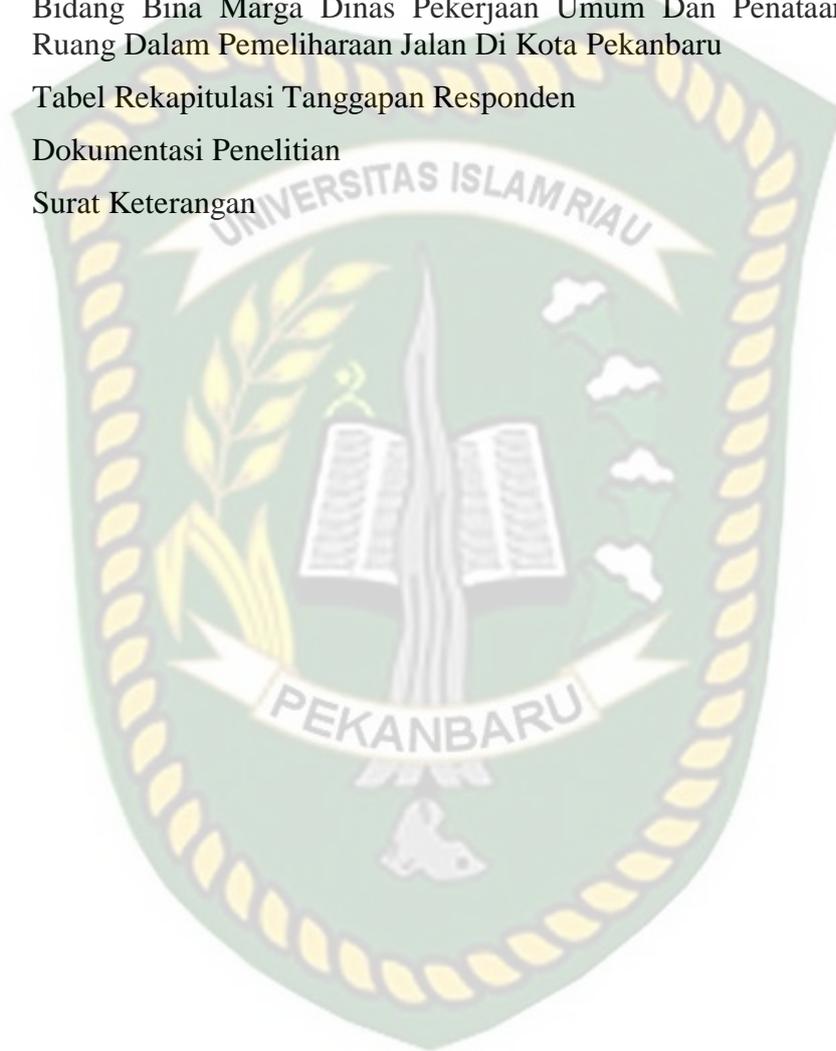
Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.....	31
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru
2. Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mky Iranda
NPM : 147310439
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2020
Pelaku Pernyataan,



Mky Iranda
NPM: 147310439

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Oleh:

Meky Iranda

NPM: 147310439

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Pemeliharaan Jalan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru. Indikator penelitian yang ditetapkan yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Tipe penelitian survei deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif melalui pengumpulan data dari responden penelitian yang menjadi sumber utama penelitian. Penarikan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling*. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder dengan teknik yang dilakukan berupa kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan berada pada kategori cukup baik. Di mana Dinas PUPR sudah melakukan pendataan, perencanaan, pekerjaan pemeliharaan. Namun masih terdapat kekurangan dari segi kualitas pekerjaan, jumlah ruas jalan yang masih banyak rusak belum menurun dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan rusak yakni terbatasnya jumlah pegawai di Bidang Bina Marga dan Alokasi anggaran pemeliharaan yang terbatas tidak sesuai dengan ruas jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru.

*Evaluation of the Implementation of Duties in the Field of Highways in the
Department of Public Works and Spatial Planning in Road Maintenance
In Pekanbaru City*

ABSTRACT

By:

Meky Iranda
NPM: 147310439

Keywords: Evaluation, Implementation, Road Maintenance

The purpose of this study was to determine the Results of the Implementation of Duties Sub-Division of Public Works Agency and Spatial Planning in Road Maintenance in Pekanbaru City. To find out the barriers to the Implementation of Duties of the Highways Department of Public Works and Spatial Planning in Road Maintenance in Pekanbaru City. The established research indicators are: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. Type of descriptive survey research using quantitative methods through data collection from research respondents who are the main source of research. The research sample was drawn using purposive sampling and incidental sampling techniques. The data collected is sourced from primary data and secondary data using techniques in the form of questionnaires, observations, interviews, and documentation. All data collected is classified according to its type and form then presented in a quantitative descriptive manner. The results of the study found that the implementation of road maintenance carried out was in a fairly good category. Where the PUPR Office has conducted data collection, planning, maintenance work. But there are still shortcomings in terms of quality of work, the number of roads that are still damaged has not decreased from year to year. The constraints faced by the Pekanbaru City PUPR Office in carrying out maintenance of damaged roads are the limited number of staff in the Bina Marga Sector and the limited maintenance budget allocation does not match the damaged roads in Pekanbaru City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV di antaranya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari tujuan negara yang telah dijelaskan di atas, tujuan Negara Indonesia untuk kesejahteraan umum, untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan bukan hanya kesejahteraan perseorangan. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan ideologi Negara tersebut, maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial. Dan kesejahteraan yang harus diciptakan bukan hanya sekedar kesejahteraan ekonomis dan material, melainkan kesejahteraan lahir batin, artinya kesejahteraan material itu harus terselenggara dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing, masyarakat yang bebas dari rasa takut, masyarakat yang hidup dalam kesederajahan dan kebersamaan masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai bagian internal dari Negara Kesatuan di atur melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Peraturan Daerah yang diatur Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini maka telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi di setiap daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan, pemerintah daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, unsur lembaga teknis maupun unsur lini kewilayahan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 (1) mengemukakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. **Pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

Pada ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Dari semua urusan yang wajib dilakukan pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembangunan bidang perhubungan terkait dengan sarana dan prasarana perhubungan sangat diperlukan karena tanpa ini fungsi-fungsi pemerintahan sulit dilaksanakan. Kota-kota di Indonesia tidak akan terlepas dari urusan pelayanan bidang pembangunan tersebut karena berhasilnya sebuah Negara menjadi Negara maju dan berkembang diawali dengan pelayanan dan penataan yang baik di setiap daerah dan wilayah kota provinsi kewenangan untuk masalah urusan pekerjaan dan penataan ruang ini gunanya adalah untuk mengatur sedemikian rupa agar kota terlihat tertib, salah satu kota yang memiliki kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi, Pekanbaru mempunyai satu Bandar Udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi ± 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan pada tahun 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19

tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru menjadi 8 kecamatan dengan luar wilayah $\pm 446,5 \text{ km}^2$, setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Di mana luas wilayah Kota Pekanbaru dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan wilayah Pekanbaru adalah $632,28 \text{ km}^2$ dengan jumlah memiliki penduduk sebesar 1.093.416 jiwa.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun susunan organisasi tersebut sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi ;
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP;
 3. Seksi Penataan Bangunan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Bidang Pertamanan, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
 2. Seksi Pembibitan Pertamanan;
 3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi di atas dinas pekerjaan umum memiliki Bidang Bina Marga. Dalam Bidang Bina Marga tersebut memiliki Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Ada pun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan dari tugas pokok dan fungsi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diikuti tugas dan fungsi Bidang Bina Marga tersebut adalah sebagai berikut;

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggara tugas pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan diberikan kewenangan pada Bidang Bina Marga.

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan;
 - b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Pengorganisasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
 - d. Pengorganisasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.
 - h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.
 - i. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
 - j. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga memiliki tugas dalam pemeliharaan jalan dan jembatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan, Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dalam pelayanan standar yang mantap. Kegiatan pemeliharaan jalan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitas, dan rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan.

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan tujuan pemeliharaan jalan yaitu.

- a. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- b. Mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal;
- c. Mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan.

Adapun ruang jalan atau bagian-bagian jalan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/MM 2011 bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel I.1 Ruang Bagian-Bagian Jalan

Bagian-Bagian Jalan		Peruntukan	Ukuran				
RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan)	Badan jalan	Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (median kekerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan saluran tepi jalan trotoar, lereng Ambang pengaman timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan perlengkapan	(arteri & kolektor) Lebar = Badan jalan (arteri & kolektor) Tinggi min = 5.00m (arteri & kolektor) kedalaman min = 1,50 m Ukuran disesuaikan lebar muka jalan dan keadaan lingkungan dalam hal tertentu, dapat dipakai sebagai lingkungan saluran lingkungan, di mana ukuran ditetapkan berdasarkan PEDOMAN (permen) situasional				
	Saluran tepi jalan	Penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas air					
	Ambang pengaman	Pengaman konstruksi					
RUMAJA (Ruang Milik Jalan)	RUMAJA+ Sejalur tertentu	Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur LL, pengamanan	Lebar minimum (mm)	Jalan bebas hambatan	Jalan raya	Jalan sedang	Jalan kecil
		Jalur tertentu, dapat untuk ruang terbuka hijau		30	25	15	11
RUWASJA (Ruang pengawasan jalan)	Ruang tertentu di luar RUMIJA	Pandangan bebas pengemudi	Lebar RUWASJA Minimum (m)				
		Pengaman konstruksi, dan	SJJ	Arteri	kolektor	Lokal	Lingkungan
		Pengaman fungsi jalan	Primer	15	10	7	5
			Skunder	15	5	3	2
		jembatan	100 m ke hilir dan 100 m ke hulu				

Sumber: UU 38/2004 & PP 34/2006: Tentang Jalan

Tabel di atas telah dijelaskan bagian-bagian jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/MM/2011. Di dalam peraturan tersebut juga menjelaskan lingkup tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (3) yaitu:

- a. Rencana umum pemeliharaan jalan;

- b. Survey pemeliharaan jalan;
- c. Pemrograman pemeliharaan jalan;
- d. Pembiayaan pemeliharaan jalan;
- e. Perencanaan teknis pemeliharaan jalan
- f. Pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- g. Penilikan jalan;
- h. Pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota; dan
- i. Peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.

Wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum di Kota Pekanbaru meliputi seluruh daerah kecamatan yang masuk ke dalam Kota Pekanbaru, Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai Pesisir, Rumbai, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya.

Di mana di Kota Pekanbaru terdapat beberapa kategori jalan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintah. Adapun kategori jalan di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel I.2 Pembagian Kewenangan Jalan di Kota Pekanbaru

No.	Kategori Jalan	Nama Jalan
1	2	3
1	Jalan Nasional	1. Jalan Jend. Sudirman 2. Jalan Raya Pasir Putih 3. Jalan Kubang Raya 4. Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang 5. Jalan Garuda Sakti 6. Jalan Lintas Pekanbaru Minas
1	2	3
2	Jalan Provinsi	1. Jalan Arifin Ahmad 2. Jalan Soekarno Hatta 3. Jalan HR Soebrantas 4. Jalan SM Amin 5. Jalan Naga Sakti 6. Jalan Tuanku Tambusai/Nangka 7. Jalan Iman Munandar/Harapan Raya 8. Jalan Hangtuah 9. Jalan Riau 10. Jalan Yos Sudarso 11. Jalan Paus Rumbai 12. Jalan Pramuka Rumbai
3	Jalan Kota Pekanbaru	1. Jalan Gajah Mada 2. Jalan Diponegoro 3. Jalan Pattimura 4. Jalan Cut Nyak Dien 6. Jalan A. Yani 7. Jalan Pepaya 8. Jalan Durian 9. Jalan KH. Ahmad Dahlan 10. Jalan Datuk Setia Amanah /Parit Indah 11. Jalan Inpres 12. Lain-lain

Sumber: Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/IV/2017.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau di atas tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, maka dapat dipastikan beberapa ruas jalan utama di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk menyelenggarakan kewenangan di bidang pembangunan, pemeliharaan jalan maka ditetapkan suatu dinas yang bertanggung jawab.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dengan adanya tugas dan fungsi tersebut seharusnya infrastruktur, tatanan kota dan aparatur jalan akan terpelihara dan terjaga dengan baik karena sudah adanya dinas yang mengatur dan memperhatikan setiap pembangunan dan tata ruang terutama jalan yang ada. Dengan demikian dari paparan di atas peneliti lebih memfokuskan untuk melihat tugas pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemeliharaan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis lakukan di lapangan mengenai evaluasi peranan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan jalan ditemukannya fenomena-fenomena yang dapat mendukung untuk diadakan penelitian. Adapun fenomena-fenomena tersebut antara lain adalah:

1. Masih banyak jalan di Kota Pekanbaru yang rusak dan belum ada penanganan pemeliharaan, seperti: di sepanjang jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah dengan kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang yang belum ada pemeliharaan sejak tahun 2018.
2. Belum terealisasinya beberapa rencana pemeliharaan jalan yang telah ditetapkan, seperti Jl. Inpres yang belum dikerjakan sampai akhir tahun anggaran padahal sudah direncanakan pemeliharaan untuk tahun 2018.

3. Kurangnya pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Misalnya belum ada kegiatan pemeliharaan penutupan jalan-jalan berlubang yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kondisi demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kajian yang mendalam dengan menetapkan judul berikut: **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarahkan sesuai dengan judul maka perlu membuat suatu perumusan permasalahan yaitu : **Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru?**

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai ilmu pemerintahan. Pada saat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.

3. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan di atas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafiie. 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Sedangkan Ndraha mengartikan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Ndraha, 2011;7).

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (dalam Syafiie, 2005:21).

Menurut Prodjodikoro dalam Munaf (2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

3. Konsep Kebijakan

Negara Indonesia ini menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” jadi dari terjemahan “*policy*” yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “publik” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Antara kebijaksanaan dan kebijakan, perbedaan yang membedakan “*policy*” sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*discretion*” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Nugroho (2006:25) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Dunn (2011:22) proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung

yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kebijakan menurut Ndraha (2011 ;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak (Young & Quinn, dalam Suharto, 2005 ;44).

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005;7)

Menurut Anderson dalam Winarno (2014;21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau satu persoalan.

Kebijakan publik menurut pendapat Friedrich dalam Agustino (2008:7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Anderson dalam Agustino (2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Dari definisi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan yang tahapannya tergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda, formulasi kebijakan, mengabdosi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

4. Konsep Evaluasi

Ndraha (2011; 201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Kemudian Ndraha (2011; 202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model *before-after*, yaitu pembanding antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, *treatment*). Tolak ukurnya dalam kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukurnya adalah *das Sollen*.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam Dunn (2011;68) Memberi arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satu nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Kemudian Dunn (2011) menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi harus digunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan/kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Kosasih dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001: 23-33) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Menurut Nurcholis (2005;169) Evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Selanjutnya menurut Syafiie (2013; 3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;

5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2011 ; 202) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ? -----→ $F = S$ -----→ ?
 - b. ? -----→ $F < S$ -----→ ?
 - c. ? -----→ $F > S$ -----→ ?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas.
7. Tindak lanjut :
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2014:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2014:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2013:268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, di mana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1994 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekanto (2013;70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

6. Konsep Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga sesuatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bias diterima.

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan

tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

7. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2012; 126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian Moekizat (2010;12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Menurut Lowler dan Porter dalam As'ad (2001; 47) menjelaskan, bahwa:

1. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Menurut Moekijat (2010;11), Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

8. Konsep Pelaksanaan Fungsi

Menurut Saefullah (2007:39) pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata, pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Menurut Komaruddin (1994:768) mendefinisikan fungsi (*function*) sebagai berikut :

1. Kegunaan;
2. Pekerjaan atau jabatan;
3. Tindakan atau kegiatan perilaku; dan
4. Kategori bagi aktivitas-aktivitas.

Menurut Terry (2001:23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Setiap implementasi kebijakan yang diinstruksikan atasan melalui pemerintah yang komunikatif, persuasif dan administrator menerima secara baik implementasi kebijakan atau program akan berjalan dengan baik. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya (Edwards III dalam Subarsono, 2009:112)

Selanjutnya menurut Ndraha (2010:57) ada dua definisi mengenai fungsi, yaitu :

1. Definisi pertama, fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dengan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini yang dianut oleh birokrasi Indonesia. Di dalam susunan dan tata kerja organisasi, tugas pokok dulu, baru fungsi.

2. Definisi kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

9. Konsep Monitoring (Pengawasan)

Menurut Subarsono (2009:113) monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Monitoring atau pemantauan (pengawasan) adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

1. Menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila monitoring mengharuskan untuk itu (Subarsono, 2009:114)

Menurut Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang tidak dipungkiri lagi. Artinya pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang, sesuai rencana semula. (dalam Syafiie, 2013:65).

Menurut Dunn ada beberapa jenis monitoring seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan (*compliance*) adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*) adalah jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
3. Akuntansi (*accounting*) adalah jenis monitoring untuk mengalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
4. Eksplanasi (*explanation*) adalah jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. (dalam Subarsono, 2009:115-116).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Masalah	Konsep Teori/ Indikator
1	2	3	4	5
1	Fingki Hermawati (2019) <i>Skripsi</i> Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR	Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi pada Bidang Bina Marga)	1. Kurangnya pengawasan dan pendataan jalan rusak 2. Banyak jalan rusak yang belum diperbaiki	1. Survey kondisi jalan 2. Petugas pelaksana 3. Pelaksanaan pemeliharaan jalan 4. Pengawasan pemeliharaan jalan

1	2	3	4	5
2	Etty Erawati (2019) <i>Skripsi</i> Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau (Studi di Kota Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak jalan yang tidak terpelihara dan membahayakan pengguna jalan 2. Muatan kendaraan yang tidak sesuai kelas jalan 3. Pengawasan yang kurang efektif dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar pelaksanaan 2. Mengadakan penilaian (<i>evaluate</i>) 3. Mengadakan tindakan perbaikan (<i>corretion Action</i>)
3.	Herry Suharyadi dan Mohamad Aji Isnani Jurnal <i>Cosmogov</i> Vol 2 No 2 Tahun 2016 Universitas Padjajaran	Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum jelas pembagian tugas dan wewenang tim reaksi cepat 2. Belum berjalannya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat 3. Belum adanya standar pengawasan yang ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Penggunaan sumber daya pemerintahan 4. Kontrol
4.	Muhamad Lukman Al Hakim (2015) Jurnal <i>Kebijakan dan Manajemen Publik</i> Vol. 3 No. 1 Tahun 2015 Universitas Air Langga	Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anggaran pemeliharaan jalan 2. Pemeliharaan jalan paling sering dilakukan di akhir tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan

Berdasarkan 4 penelitian di atas yang dijadikan sumber rujukan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak sama-sama membahas mengenai pemeliharaan jalan yang dilakukan pemerintah dan metode yang digunakan sama. Sementara perbedaan terletak pada objek dan subjek penelitian penelitian, teori

yang digunakan, dan dengan permasalahan utama yang berbeda. Dengan demikian penelitian yang peneliti laksanakan termasuk dalam penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang di anggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variabel penelitian beserta indikator-indikator terkait. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan jalan. Adapun kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang menyatakan dalam suatu kata atau simbol. Definisi operasional menyatakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan.

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep sebagai berikut:

- a. Evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pemerintahan di Kota Pekanbaru yang berada di bawah pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Bina Marga adalah salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan (merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan) yang berkaitan dengan jalan dan jembatan.
- d. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi

jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

e. Evaluasi pelaksanaan tugas dalam pemeliharaan jalan ditinjau dari indikator penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang dilakukan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tentang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru dan kemudian membuat rencana penanganan pada jalan-jalan yang rusak untuk dilakukan pemeliharaan melalui metode pemeliharaan yang telah disepakati.
2. Efisiensi dalam penelitian adalah langkah efisien yang dilakukan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mendata jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan kondisinya melalui survey inventarisasi jalan dan survey kondisi jalan.
3. Kecukupan dalam penelitian adalah cara yang ditempuh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan, dan jenis penanganan yang tepat.
4. Perataan dalam penelitian adalah langkah yang dilakukan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melakukan pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan.

5. Responsivitas dalam penelitian adalah hasil kerja atas pemeliharaan jalan yang dilakukan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan penilaian hasil kerja yang memuaskan dan pemeliharaan terus menerus.
6. Ketepatan dalam penelitian ini adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pemeliharaan jalan yang tepat sasaran dan berdampak pada ruas jalan rusak menjadi berkurang.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan memahami arah penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2011:201).	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru	1. Efektivitas	a. Informasi aset b. Rencana penanganan pemeliharaan jalan.	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. Efisiensi	a. Survei inventarisasi jalan b. Survei kondisi jalan	Baik Cukup baik Kurang baik
		3. Kecukupan	a. Mencakup penetapan lokasi b. Waktu penanganan c. Jenis penanganan yang tepat	Baik Cukup baik Kurang baik

1	2	3	4	5
		4. Perataan	a. Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, b. Pemeliharaan berkala, c. Rehabilitasi jalan d. Rekonstruksi jalan	Baik Cukup baik Kurang baik
		5. Responsivitas	a. Hasil kerja atas pemeliharaan yang memuaskan b. Pemeliharaan yang terus menerus	Baik Cukup baik Kurang baik
		6. Ketepatan	a. Pemeliharaan jalan yang tepat sasaran b. Menurunnya ruas jalan yang rusak	Baik Cukup baik Kurang baik

F. Teknik Pengukuran

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut:

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

Adapun pengukuran untuk indikator penelitian ini adalah:

1. Efektivitas.

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

2. Efisiensi.

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

3. Kecukupan

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

4. Perataan

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

5. Responsivitas

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%

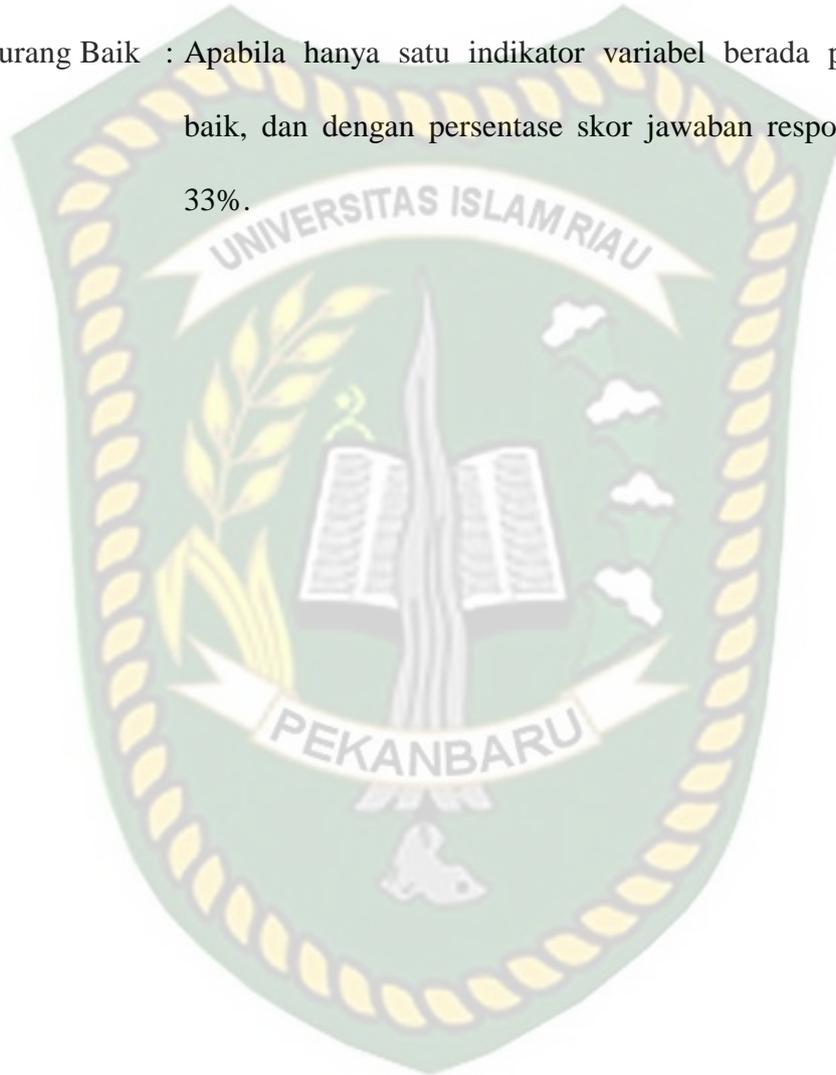
Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.

6. Ketepatan

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0% - 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam sebuah tipe penelitian digunakan berdasarkan pada jenis data dan analisis adalah tipe penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:8) penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan demikian penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun sifat penelitian deskriptif yaitu bentuk deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta pada Bidang Pemeliharaan Jalan di kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian Jl. Kartama/Inpress dan Jl. Parit Indah. yang berdasarkan sebagai pedoman melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk mencapai tugas yang telah ditetapkan khususnya pada pemeliharaan jalan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan masyarakat pengguna jalan. Berhubungan penulis ingin mengetahui peranan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru maka hanya masyarakat yang dijadikan responden. Sedangkan untuk populasi masyarakat yang dilayani sampelnya penulis ambil menggunakan teknik *accidental sampling* yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Bina Marga	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	1	1	100%
3.	Pegawai Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	19	6	31%
4.	Masyarakat Pengguna Jalan dan Perumahan di sekitar Jalan Kota Pekanbaru	~	30	~
Jumlah			38	~

Sumber data : *Olahan Peneliti Pada Tahun 2019.*

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel untuk dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, menggunakan teknik sensus, yaitu semua populasi akan dijadikan sampel dan responden, karena jumlah populasi relatif kecil dan berada pada tempat kerja yang sama.

Selanjutnya, untuk pegawai Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*. Di mana pegawai yang dijadikan sampel merupakan pegawai yang terlibat langsung dan memahami masalah pemeliharaan jalan. Sedangkan dilihat dari jumlah populasi penelitian yaitu masyarakat pengguna jalan yang jumlahnya tidak terhingga, maka teknik pengambilan sampel menggunakan teknik “*Nonprobability Sampling*” yaitu “*Insidental Sampling*” adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang peneliti temui secara kebetulan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data dan informasi dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009:96).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diambil atau diperoleh secara langsung dari responden untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, merupakan data-data pendukung lainnya meliputi buku-buku hasil dari penelitian lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Tugas Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan pengamatan langsung ke tempat penelitian. Dengan adanya observasi penulis bisa mendapatkan masalah atau kejadian sesungguhnya di lapangan, mengenai tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang dijadikan sampel, baik Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai dan masyarakat mengenai tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arti penting sebagai bukti ataupun keterangan untuk dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

G. Teknik Analisis Data

Ketika semua data sudah dikumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan di iringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data dan hasil penelitian tentang pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru.

H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun perincian jadwal kegiatan penelitian diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.2. Perincian Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

Jenis Kegiatan	Tahun 2020/Bulan/Minggu																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UP	■	■	■	■																
Seminar UP																				
Revisi UP									■											
Revisi Kuesioner										■										
Analisa Data											■	■								
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
Perbaikan Bab per Bab													■	■	■	■				
Acc. Skripsi																	■			
Ujian Skripsi																		■		
Perbaikan																			■	■
Penggadaan Skripsi																				■

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**PekanBaharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **PEKANBARU**.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- 10.UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

2. Wilayah Geografis

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

b. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

3. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Susqa, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya

dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

4. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2015 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2016 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2015 dan 2.14% pada bulan Februari 2015.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa

pusat perbelanjaan modern, di antaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant, serta Transmart kemudian yang terbaru Living Word. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

1. Struktur Organisasi Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun susunan organisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi ;
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP;
 3. Seksi Penataan Bangunan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Tata Ruang, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Pertamanan, membawahi;

1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
2. Seksi Pembibitan Pertamanan;
3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

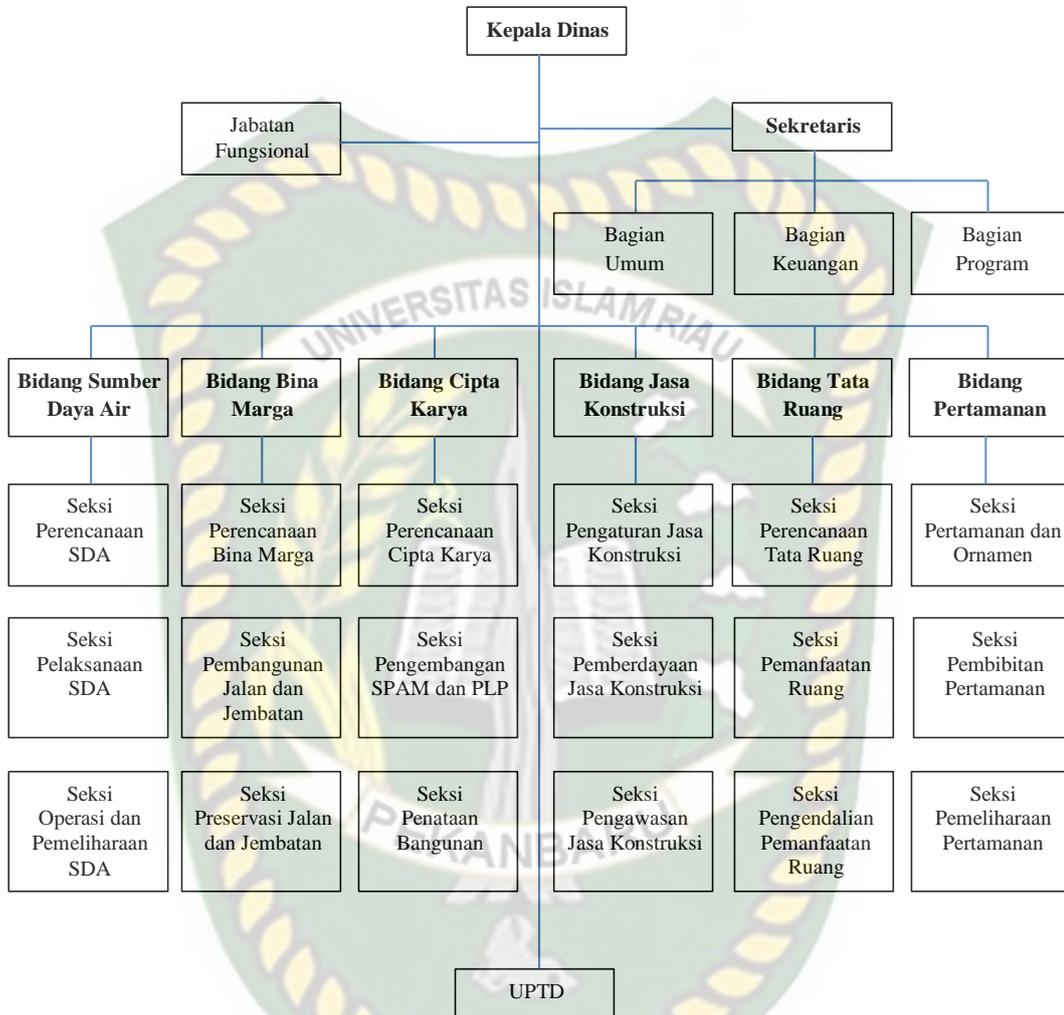
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat diperjelas dari gambar struktur organisasi berikut di bawah ini:



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2019.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

Untuk menyelenggara tugas pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan diberikan kewenangan pada Bidang Bina Marga.

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan;
- b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pengorganisasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- d. Pengorganisasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.
- f. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.
- h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.
- i. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

- j. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Bina Marga

Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan perencanaan Bina Marga. Seksi Perencanaan Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik dan preservasi jalan dan jembatan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan survey pengukuran, perencanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- c. Penyusunan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan berdasarkan teknik jalan dan jembatan.
- d. Penyusunan dan perumusan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- f. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan.

- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi.
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan pembangunan jalan dan jembatan. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan.
- d. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

- g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

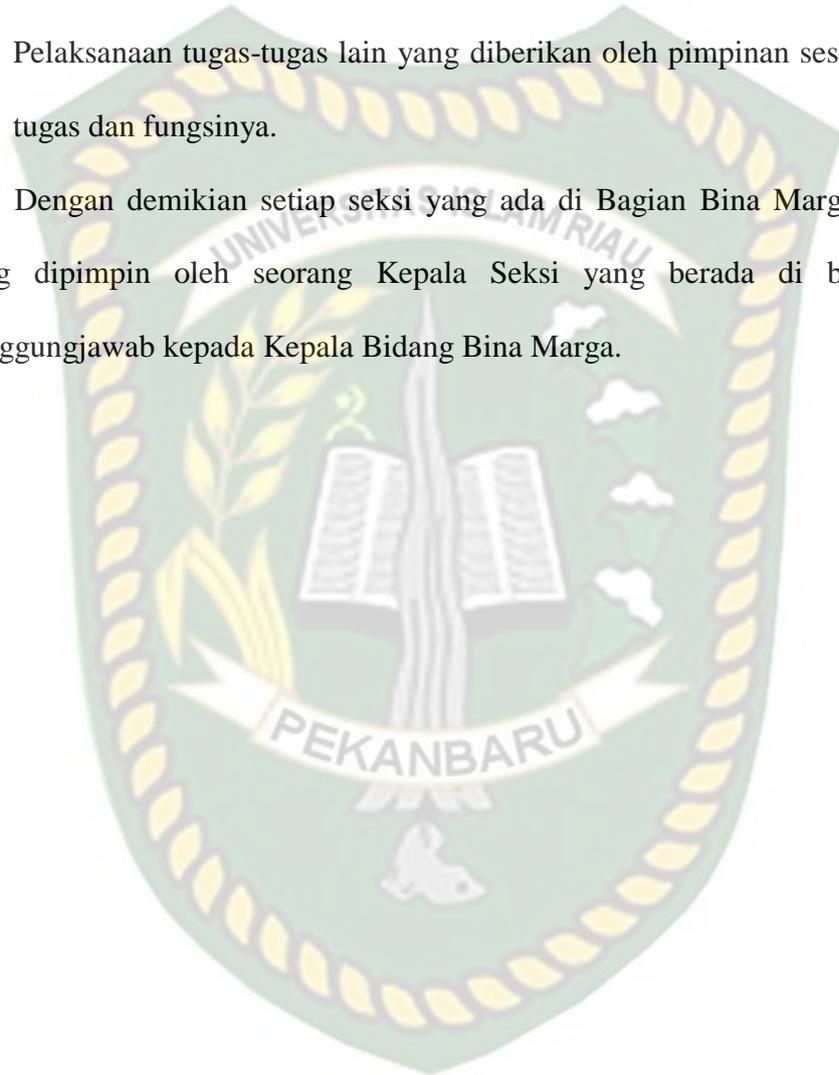
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan preservasi jalan dan jembatan. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan preservasi jalan dan jembatan.
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan.
- f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi.
- g. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitas pengadaan barang dan jasa.

- i. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan preservasi jalan dan jembatan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian setiap seksi yang ada di Bagian Bina Marga, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru beserta hambatan-hambatannya, terlebih dahulu diuraikan identitas responden dalam penelitian.

1. Usia Responden

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah diajukan kepada 36 orang responden yang terdiri dari 6 orang pegawai Bidang Bina Marga dan 30 orang masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui usia para responden tersebut . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai		
	<25 Tahun	1	16,7%
	26 – 30 Tahun	2	32,2%
	31 – 35 Tahun	1	16,7%
	36 – 40 Tahun	1	16,7%
	> 41 Tahun	1	16,7%
	Jumlah	6	100%
2	Masyarakat		
	<25 Tahun	7	23,3%
	26 – 30 Tahun	5	16,7%
	31 – 35 Tahun	5	16,7%
	36 – 40 Tahun	3	10,0%
	41 – 45 Tahun	5	16,7%
	46 – 50 Tahun	3	10,0%
	> 51 Tahun	2	6,7%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 36 orang responden tersebut untuk pegawai Bidang Bina Marga usia terendah berada pada usia 22 tahun dan usia tertinggi pada tingkat usia 41 tahun. Kemudian tingkatan usia masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru dengan usia terendah berada pada tingkat usia 19 tahun dan tingkatan usia tertinggi berada pada usia 62 tahun, dengan rentang usia yang terbanyak berada pada 19 – 35 tahun. Dengan demikian usia yang dimiliki responden sudah berasal dari semua kalangan usia dewasa, sehingga diharapkan mampu memberikan tanggapan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada.

2. Jenis Kelamin Responden Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, maka berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Pegawai		
	Laki-laki	4	66,7%
	Perempuan	2	33,3%
	Jumlah	6	100%
2.	Masyarakat		
	Laki-laki	24	80,0%
	Perempuan	6	20,0%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 36 orang responden terdapat responden berasal dari pegawai Bidang Bina Marga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan 2 orang. Kemudian dari responden masyarakat terdapat 24 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang

berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian jelaslah bahwa responden pada penelitian ini sudah terwakili dari masing-masing jenis kelamin.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Selanjutnya diuraikan tingkat pendidikan responden yang terdiri dari 36 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Pegawai		
	Strata 1 (S.1)	6	100%
	Jumlah	6	100%
2.	Masyarakat		
	SMP	6	20,0%
	SMA/SMK/Sederajat	15	50,0%
	D.III	2	6,7%
	S-1	7	23,3%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 36 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, di mana dari pegawai Bidang Bina Marga seluruhnya memiliki tingkat pendidikan S-1. Sementara dari masyarakat pengguna jalan tingkat pendidikan terendah SMP dan tertinggi S-1, dengan mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK/Sederajat. Dengan demikian dari tingkatan pendidikan yang dimiliki responden maka diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan fisik, salah satu pembangunan yang menjadi kunci dari keberhasilan adalah pembangunan jalan. Di mana pembangunan jalan merupakan sarana masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang baik dan lancar, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya pembangunan dan menjaga atau memelihara jalan-jalan yang ada sehingga bisa dilalui atau dilewati dengan baik.

Sementara saat ini di Kota Pekanbaru sangat banyak terdapat jalan-jalan yang berlobang dan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di mana dengan kondisi jalan yang tidak baik banyak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat pengguna jalan, seperti terganggunya perjalanan berlalu lintas, kecelakaan, dan sebagainya.

Untuk terus berupaya memberikan pelayanan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat, tentunya pemerintah daerah Kota Pekanbaru sudah menyiapkan tugas khusus kepada instansi tertentu untuk menangani masalah pembangunan dan pemeliharaannya. Instansi yang berwenang menyelenggarakan pekerjaan bidang pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dari dinas ini terdapat beberapa bidang dan seksi, terkhusus yang menangani masalah pemeliharaan jalan terdapat pada Bidang Bina Marga dan yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dilimpahkan kepada Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

.Untuk melihat seberapa besar pelaksanaan pemeliharaan jalan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan melalui pemetaan perencanaan jalan-jalan rusak dengan menetapkan status kondisi jalan. Dengan adanya perencanaan pemeliharaan ini pemerintah daerah sudah mengetahui dengan pasti jalan-jalan yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, sehingga tindakan yang dapat diambil sesuai dengan kategori jalan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya mengenai indikator efektivitas dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.4. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Efektivitas

No.	Item Penilaian Indikator Efektivitas	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Memiliki informasi mengenai status jalan	0	6	0	6
2	Rencana penanganan pemeliharaan jalan	0	6	0	6
	Jumlah	0	12	0	12
	Rata-rata	0	6	0	6
	Persentase (%)	0	100%	0	100%
Masyarakat					
2	Rencana penanganan pemeliharaan jalan	9	0	21	30
	Jumlah	9	0	21	30
	Persentase (%)	30%	0	70%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari data di atas, maka dapat diuraikan mengenai indikator efektivitas dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru. Di mana secara terpisah seluruh responden berasal dari pegawai Bidang Bina Marga menyatakan sudah memiliki informasi semua status jalan dan sudah ada rencana penanganan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru, sehingga secara bersama-sama seluruh responden memberikan tanggapan cukup baik.

Sementara dari responden masyarakat dapat dinyatakan indikator efektivitas pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru kurang baik. Di mana terdapat 9 orang menyatakan baik dan 21 orang menyatakan kurang baik dalam mengetahui rencana pemeliharaan jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru.

Hasil yang diberikan di atas diperjelas dari tanggapan wawancara yang diberikan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagai berikut:

“Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah pasti tahu dan memiliki data semua status jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk setiap tahunnya dilakukan pengawasan dan pendataan ruas-ruas jalan yang rusak serta kategori rusaknya. Bila mana jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru rusak ringan akan dilakukan rencana tindakan penindakan tampal sulam, sedangkan bila kondisi jalan berada pada kategori rusak sedang atau berat akan dilakukan kegiatan overlay (pengaspalan ulang)” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019)

Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan baik secara langsung maupun dari informasi media massa dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan kondisi jalan-jalan rusak dan membuat rencana pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang dilimpahkan. Di mana pada tahun 2019 lalu terdapat 1.385 titik jalan rusak dengan panjang jalan 362 Km di Kota Pekanbaru, sedangkan dana yang dimiliki

untuk melakukan pemeliharaan berasal dari APBD sebanyak 18 Milyar dan APBD-P 6,5 Milyar.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada indikator efektivitas pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru secara umum sudah berada pada kategori baik. Di mana pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR sudah melakukan pendataan kondisi-kondisi jalan rusak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota dan membuat rencana pemeliharaan jalan rusak sesuai dengan kategori kondisi jalan.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam penelitian ini merupakan ketepatan pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas PUPR dengan menggunakan langkah-langkah pengamatan langsung ke lapangan. Dengan langkah ini diharapkan inventarisasi jalan-jalan rusak dapat benar-benar akurat dan bisa melaksanakan pemeliharaan melalui skala prioritas.

Adapun tanggapan responden mengenai indikator efisiensi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Efisiensi

No.	Item Penilaian Indikator Efisiensi	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Melakukan survey inventarisasi jalan yang ada	0	2	4	6
2	Melakukan survey jalan yang rusak	0	6	0	6
	Jumlah	0	8	4	12
	Rata-rata	0	4	2	6
	Persentase (%)	0	66,7%	33,7	100%
Masyarakat					
2	Survey jalan rusak yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru	6	15	9	30
	Jumlah	6	15	9	30
	Persentase (%)	20%	50%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari pemaparan data yang tertuang pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa indikator efisiensi pada penelitian ini secara umum berada pada kategori cukup baik. Di mana dari responden pegawai Bidang Bina Marga secara keseluruhan memberikan tanggapan cukup baik sebanyak 4 orang dan tanggapan kurang baik sebanyak 2 orang.

Sementara dari tanggapan masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru secara keseluruhan memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, tanggapan cukup baik 15 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 9 orang. Hasil ini memberi gambaran bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR sudah melakukan survey jalan rusak dan sekaligus melakukan inventarisasi jalan yang ada.

Hasil ini senada dengan tanggapan yang diberikan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan berikut:

“Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melakukan langkah atau rencana pemeliharaan terhadap jalan-jalan yang rusak diperoleh dari dua informasi. Informasi pertama dari survey lapangan atau pengamatan langsung ke setiap ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan langkah kedua menerima laporan atau aduan dari masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019)

Dari pengamatan yang penulis lakukan baik langsung maupun dari media massa diketahui bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan melakukan pendataan kondisi jalan. Hal ini sebagaimana berita-berita di media masa yang diperoleh bahwa pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengetahui dengan pasti jumlah ruas jalan rusak dan panjang jalan rusak.

Dengan demikian dari tanggapan dan hasil wawancara secara pengamatan yang telah peneliti laksanakan, maka dapat dikatakan bahwa indikator efisiensi pada penelitian mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru berada pada kategori cukup baik. Di mana pemerintah sudah melakukan pendataan, namun kegiatan tersebut hanya dilakukan satu tahun sekali yakni pada bulan Februari dan informasi lainnya berasal dari laporan atau aduan dari masyarakat.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam penelitian adalah kemampuan dari Dinas PUPR dalam melakukan pemeliharaan terhadap seluruh jalan yang rusak dengan mengedepankan skala prioritas dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan demikian kecukupan yang dimaksud yakni kemampuan Dinas PUPR dalam melakukan pemeliharaan jalan secara baik dan tepat sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil tanggapan yang diberikan responden sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel V.6. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Kecukupan

No.	Item Penilaian Indikator Kecukupan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Mengetahui mengenai penanganan pemeliharaan jalan di lokasi tertentu pada waktu yang ditetapkan	0	6	0	6
2	Penanganan pemeliharaan jalan yang rusak dilaksanakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran	6	0	0	6
	Jumlah	6	6	0	12
	Rata-rata	3	3	0	6
	Persentase (%)	50%	50%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator kecukupan hanya dilihat dari tanggapan dari pegawai Bidang Bina Marga, dikarenakan kecukupan ataupun kemampuan yang dimiliki Dinas PUPR hanya diketahui para pegawai saja, sementara masyarakat belum tentu mengetahui dengan jelas. Di mana dari tanggapan yang diberikan sebanyak 3 orang responden memberikan tanggapan baik dan sebanyak 3 orang menyatakan cukup baik. Hasil ini menjelaskan bahwa Dinas PUPR telah merencanakan penanganan pemeliharaan jalan rusak dengan menetapkan lokasi dan waktu pekerjaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan diperoleh informasi berikut ini:

“Dinas PUPR setiap tahunnya sudah merencanakan pelaksanaan pemeliharaan dan menentukan jalan yang harus diperbaiki secara tumpul sulam maupun overlay. Namun terkadang tidak semua rencana yang ditetapkan bisa direalisasikan, hal ini dikarenakan tergantung dari besarnya anggaran yang bakal disahkan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah bersama DPRD pada masalah pemeliharaan jalan” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sementara dari pengamatan atau observasi yang telah peneliti lakukan tergambar jelas bahwa Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga sudah menetapkan rencana pemeliharaan yang tertuang dalam rencana kerja yang diusulkan Seksi Perencanaan Bina Marga dan dilaksanakan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. Di mana pada tahun 2019 lalu sudah terdapat beberapa ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan berupa tambal sulam maupun overlay seperti tambal sulam ruas jalan di Jalan Inpres dan jalan lainnya.

Dengan demikian dari hasil tanggapan responden, hasil wawancara, maupun dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan berada pada kategori cukup baik. Di mana semua rencana yang telah ditetapkan tidak seluruhnya bisa direalisasikan, dikarenakan Dinas PUPR tergantung dari besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah, sementara jalan yang rusak sangat banyak dengan panjang jalan rusak 362 Km dengan 1.385 titik jalan dengan berbagai kategori kerusakan.

4. Perataan

Peralatan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki Dinas PUPR Kota Pekanbaru dengan melaksanakan pemeliharaan jalan dengan merata di semua lokasi tanpa memandang status dari masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden pada indikator perataan ini maka dapat dilihat dari tanggapan responden sebagaimana didistribusikan pada tabel berikut:

Tabel V.7. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Perataan

No.	Item Penilaian Indikator Perataan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala	6	0	0	6
2	Penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan rusak	6	0	0	6
	Jumlah	12	0	0	12
	Rata-rata	6	0	0	6
	Persentase (%)	100%	0	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa indikator perataan secara keseluruhan yang merupakan tanggapan dari pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru secara umum berada pada kategori baik. Di mana seluruh responden memberikan tanggapan baik pada pertanyaan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala, penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan rusak.

Hasil di atas sejalan dengan tanggapan yang diberikan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan berikut ini:

“Pemeliharaan jalan rusak dilakukan setiap tahunnya secara berkala sesuai dengan anggaran yang tersedia” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Dari tanggapan di atas jelaslah bahwa setiap tahunnya Dinas PUPR telah melakukan pemeliharaan jalan rusak dan menetapkan pemeliharaan dalam satu

periode anggaran yakni APBD dan APBD-P. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah sudah melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan-jalan yang rusak sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sementara pengamatan yang penulis lakukan terdapat beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru yang memiliki intensitas pengguna jalan yang tinggi menjadi prioritas pemeliharaan jalan. Namun tidak seluruh jalan yang bisa dikerjakan untuk dilakukan pemeliharaan hal ini dikarenakan ruas jalan rusak dengan dana atau anggaran yang tersedia tidak sebanding atau tidak mencukupi, sehingga Dinas PUPR menetapkan skala prioritas yakni jalan yang memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi dan rawan kecelakaan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa indikator perataan ini berada pada kategori baik. Di mana pemerintah melalui Dinas PUPR telah menetapkan ruas jalan yang diperbaiki dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sesuai anggaran yang ada.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini berupa hasil kerja yang diberikan Dinas PUPR dalam melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan yang rusak dan dengan kualitas perbaikan yang cukup memuaskan pengguna jalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator responsivitas pada penelitian ini dapat dilihat tanggapan responden sebagaimana tertuang pada data yang didistribusikan pada tabel berikut:

Tabel V.8. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Responsivitas

No.	Item Penilaian Indikator Responsivitas	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Memberikan hasil kerja atas pemeliharaan jalan yang memuaskan	4	2	0	6
2	Melaksanakan pemeliharaan jalan rusak secara terus menerus	4	2	0	6
	Jumlah	8	4	0	12
	Rata-rata	4	2	0	6
	Persentase (%)	66,7	33,3%	0	100%
Masyarakat					
2	Hasil kerja atas pemeliharaan jalan yang memuaskan	1	29	0	30
	Jumlah	1	29	0	30
	Persentase (%)	3,3%	96,7	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan hasil penelitian mengenai indikator responsivitas secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik. Di mana dari responden pegawai memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang dan tanggapan cukup baik 2 orang. Hal ini diperlihatkan dari tanggapan mengenai hasil kerja yang diberikan memuaskan masyarakat pengguna jalan dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin.

Sementara dari tanggapan yang diberikan masyarakat pada penelitian ini difokuskan pada hasil kerja atas pemeliharaan jalan rusak. Di mana sebanyak 1 orang responden memberikan tanggapan baik dan sebanyak 29 orang menyatakan cukup baik. Tanggapan ini memberikan indikasi bahwa secara keseluruhan pemeliharaan jalan yang dilakukan sudah cukup memuaskan masyarakat pengguna jalan dikarenakan jalan tersebut tidak lagi berlobang atau rusak, walaupun pada teknik tambal sulam jalan yang ditambah menjadi tidak rata.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan diperoleh informasi berikut:

“Kualitas atau mutu pemeliharaan dari jalan yang rusak sudah sesuai dengan standar atau ketentuan pekerjaan konstruksi” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019)

Hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan terlihat pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan tidak seluruhnya memuaskan. Di mana pada kegiatan tambal sulam, banyak jalan rusak yang diprioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu dilakukan penggalian ulang atau pemotongan pada bagian yang rusak, namun pekerjaan yang dilakukan sering kali terlalu lama sehingga jalan menjadi berlobang dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Sementara mutu atau kualitas pemeliharaan jalan ada yang sudah baik yakni aspal baru pada metode tambal sulam datar dengan jalan sebelumnya, tetapi ada juga aspal baru lebih tinggi dari aspal lama sehingga membuat jalan menjadi bergelombang.

Dengan demikian dari hasil penelitian mengenai indikator responsivitas pada penelitian ini dapat dikatakan berada pada kategori cukup baik. Di mana hasil kerja pemeliharaan jalan yang rusak tidak seluruhnya memuaskan masyarakat pengguna jalan mulai dari proses pengerjaan sampai jalan sudah layak untuk digunakan atau dilalui pengguna jalan.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran dari pemeliharaan jalan yang dilakukan, sehingga ruas jalan rusak setiap tahunnya menjadi

berkurang. Untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat ketepatan dari pemeliharaan jalan yang dilaksanakan Dinas PUPR.

Tanggapan yang diberikan responden dapat didistribusikan pada tabel frekuensi berikut ini:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Kecukupan

No.	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Pemeliharaan jalan yang tepat sasaran	2	4	0	6
2	Setiap tahunnya ada penurunan ruas jalan yang rusak di Kota Pekanbaru	6	0	0	6
	Jumlah	8	4	0	12
	Rata-rata	4	2	0	6
	Persentase (%)	66,7	33,7%	0	100%
Masyarakat					
1	Pemeliharaan jalan yang tepat sasaran	6	2	22	30
2	Setiap tahunnya ada penurunan ruas jalan yang rusak di Kota Pekanbaru	8	4	18	30
	Jumlah	14	6	40	60
	Rata-rata	7	3	20	30
	Persentase (%)	23,3%	10%	66,7%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Tanggapan yang diberikan responden di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa ketepatan dalam melakukan pemeliharaan jalan rusak di Kota Pekanbaru kurang baik. Di mana dari tanggapan pegawai Dinas PUPR diperoleh tanggapan baik sebanyak 4 orang dan tanggapan cukup baik sebanyak 2 orang. Sementara dari masyarakat menyatakan baik sebanyak 7 orang, tanggapan cukup baik 3 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 20 orang. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru

belum sepenuhnya tepat sasaran. Di mana masih terdapat jalan dengan intensitas tinggi belum mendapat prioritas pemeliharaan seperti Jalan Parit Indah atau Datuk Setia Maharaja dan jalan-jalan intensitas tinggi lainnya.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan diperoleh informasi berikut:

“Sampai saat ini jumlah ruas jalan yang rusak terdapat 783 ruas jalan dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Prioritas pemeliharaan tentunya pada jalan-jalan yang intensitas lalu lintas tinggi oleh masyarakat” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2019)

Dari pengamatan yang penulis lakukan, masih banyak ruas jalan utama yang rusak dalam kondisi ringan, sedang dan berat. Di mana dengan ruas jalan yang rusak diperbaiki pada tahun 2019 hanya terdapat beberapa ruas jalan saja seperti jalan parit indah, jalan suka karya, dan jalan lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruas jalan yang rusak di Kota Pekanbaru belum terjadi penurunan yang signifikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa indikator kecukupan secara umum berada pada kategori kurang baik. Di mana terdapat pemeliharaan jalan yang belum tepat sasaran, sehingga banyak jalan yang seharusnya diperbaiki tetapi tidak diperbaiki. Sementara dari segi penurunan ruas jalan yang rusak belum berkurang signifikan, sehingga setiap tahunnya jumlah ruas jalan yang rusak belum berkurang dalam jumlah yang besar. Malahan terdapat beberapa jalan lain yang sebelumnya dalam kondisi baik menjadi rusak.

Dari pemaparan masing-masing indikator yang ditetapkan pada penelitian ini, maka dapat disatukan dalam tabel rekapitulasi sebagai langkah untuk menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun tabel rekapitulasi penelitian sebagai berikut:

Tabel V.10 : Rekapitulasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Pegawai					
1	Efektivitas	-	6	-	6
2	Efisiensi	-	4	2	6
3	Kecukupan	3	3	-	6
4	Perataan	6	-	-	6
5	Responsivitas	4	2	-	6
6	Kecukupan	4	2	-	6
	Jumlah	17	17	2	36
	Persentase (%)	47,2%	47,2%	5,6%	100%
Masyarakat					
1	Efektivitas	9	-	21	30
2	Efisiensi	6	15	9	30
3	Responsivitas	1	29	-	30
4	Kecukupan	7	3	20	30
	Jumlah	23	47	50	120
	Persentase (%)	19,2%	39,2%	41,6%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Tabel rekapitulasi di atas dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan rusak di Kota Pekanbaru. Di mana dari pegawai Dinas PUPR memberikan pernyataan berada pada kategori cukup baik atau sebesar 47,2%. Sementara dari masyarakat memberikan pernyataan kurang baik atau sebesar 41,6%. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan rusak di Kota Pekanbaru secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik. Hal ini dinyatakan karena sudah ada upaya yang telah

dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melakukan pemeliharaan jalan rusak agar menjadi jalan dalam kondisi baik untuk dilalui.

C. Hambatan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang diperoleh di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya personil

Dinas PUPR khususnya pada Bidang Bina Marga memiliki personil atau pegawai sebanyak 32 orang yang terbagi dalam 3 seksi. Di mana seksi yang melakukan pendataan dan pengerjaan jalan rusak yakni Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan memiliki pegawai keseluruhannya 11 orang terdiri dari 6 orang PNS dan 5 orang THL, sehingga dalam melakukan pendataan seluruh jalan rusak di Kota Pekanbaru tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kekurangan personil menyebabkan Bidang Bina Marga Dinas PUPR belum mampu mendata secara keseluruhan jumlah ruas jalan dan panjang jalan yang rusak secara akurat, sehingga pendataan yang ada saat ini sebatas data yang ditemui pada saat kelapangan yang dilalui saja serta ada informasi dari masyarakat. Sementara ruas jalan lainnya yang rusak belum terdata dikarenakan belum adanya survey lapangan yang dilakukan serta tidak ada laporan dari masyarakat. Hal ini menyebabkan ruas jalan rusak dan ruas jalan terdata belum sepenuhnya akurat dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

2. Anggaran

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pemeliharaan jalan tidak sebanding dengan ruas jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga tidak terjadi penurunan panjang jalan rusak dari tahun ke tahun. Banyak dan panjangnya ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru menyebabkan Bidang Bina Marga kewalahan dalam melakukan pemeliharaan, dikarenakan jumlahnya yang banyak juga anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi.

Di mana pada tahun 2019 jalan yang rusak sepanjang 360 Km dengan kriteria rusak berat sepanjang 28,2 Km dan rusak ringan 133 Km. Sementara anggaran yang dislokasi pada tahun 2019 sebesar 12 Milyar, angka yang kecil untuk melakukan pemeliharaan. Padahal dari perhitungan biaya pemeliharaan jalan sepanjang 1 Km sebesar 1 Milyar (untuk rusak berat). Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat mengapa ruas jalan rusak tidak terjadi penurunan yang berarti.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas PUPR dalam melaksanakan pemeliharaan jalan rusak di Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan menjadi tugas dari Bidang Bina Marga, sehingga dalam penelitian ini diperoleh informasi yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan berada pada kategori cukup baik. Di mana Dinas PUPR sudah melakukan pendataan, perencanaan, pekerjaan pemeliharaan. Namun masih terdapat kekurangan dari segi kualitas pekerjaan, jumlah ruas jalan yang masih banyak rusak belum menurun dari tahun ke tahun.
2. Kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan rusak yakni terbatasnya jumlah pegawai di Bidang Bina Marga dan Alokasi anggaran pemeliharaan yang terbatas tidak sesuai dengan ruas jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menyebabkan pemeliharaan jalan yang ada di Kota Pekanbaru belum maksimal.

B. Saran.

1. Hendaknya Pemerintah Daerah menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait yakni Dinas PUPR dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dinas.

2. Hendaknya Dinas mengusulkan penambahan pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, agar pekerjaan yang dilakukan bisa efektif dan efisiensi serta memiliki kualitas yang baik
3. Hendaknya kepada masyarakat turut andil dalam mengawasi kegiatan pemeliharaan maupun memberikan laporan bila ada jalan rusak yang sudah mengganggu aktivitas pengguna jalan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- As'ad, M. 2001. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty
- Dunn, N William, 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Komaruddin. 1994. *Eksiklopedi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moekijat, 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai*, Bandung: Ramaja Rosdkarya.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. Dwijowijoto. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah* Jakarta, Gramedia Widarsana.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Saefullah, Kurniawan dan Ernie Tisnawati Sule. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siagian, Sondang P, 2012. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Soekanto, Soejarno, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori, dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kajian Sosial*. Bandung: Alfabeta

Sutopo dan Sugiyanto, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Reneka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Zulkilfli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Daerah Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/ 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Skripsi/Jurnal:

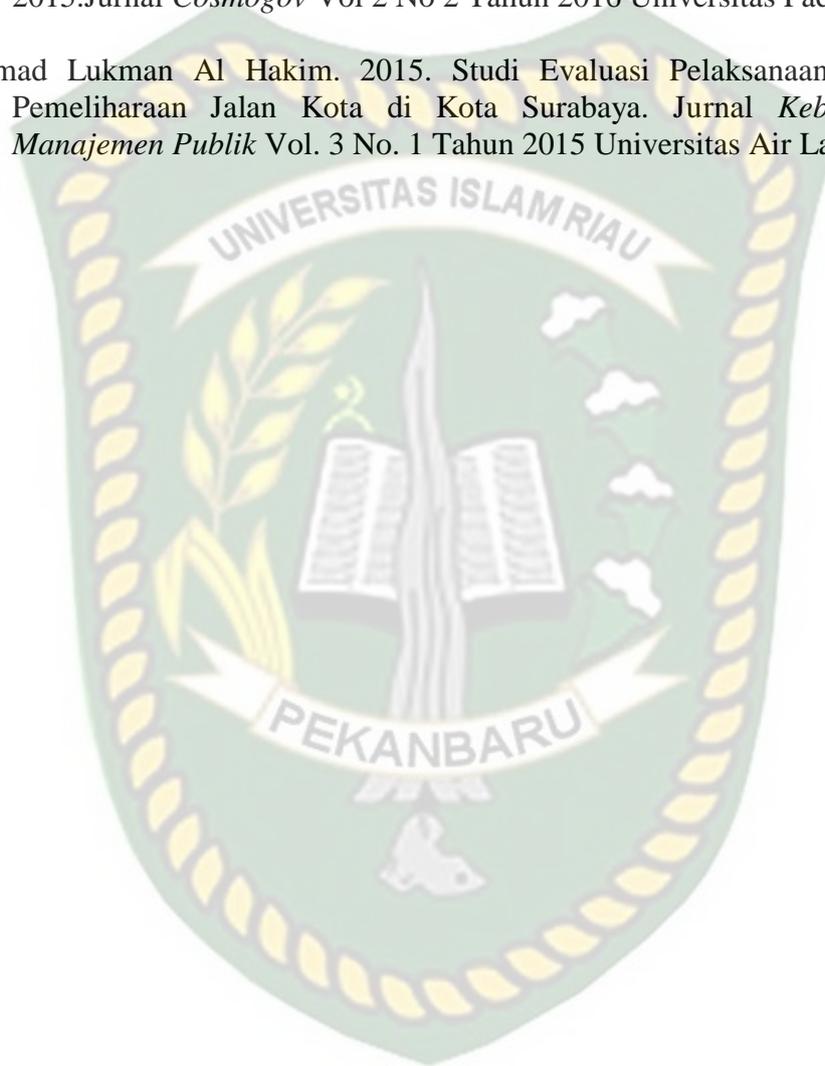
Etty Erawati. 2019. Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau (Studi di Kota Pekanbaru). *Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR*

Fingki Hermawati. 2019. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi pada

Bidang Bina Marga). *Skripsi* Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

Herry Suharyadi dan Mohamad Aji Isnani. 2016. Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015. *Jurnal Cosmogov* Vol 2 No 2 Tahun 2016 Universitas Padjajaran

Muhamad Lukman Al Hakim. 2015. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 3 No. 1 Tahun 2015 Universitas Air Langga



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau